

PERINGATAN YOGYA KEMBALI Sejarah Bukan Hanya Bagian Masa Lalu

YOGYA (KR) - Sejarah Yogya Kembali merupakan peristiwa besar. Seyogianya diperingati secara nasional. Sebab peristiwa Yogya Kembali terjadi pada saat Ibukota RI berada di Yogya, sehingga penarikan mundur tentara Belanda dari Yogya bisa dimaknai penarikan mundur tentara Belanda dari Indonesia.

Namun seperti disampaikan Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho SP MSI, pada waktu itu tidak semua melakukan penarikan mundur pasukan tentara Belanda, sehingga untuk menjadikan Yogya Kembali menjadi peristiwa besar membutuhkan kajian khusus, agar semua pihak memahami bahwa yang dilakukan Pemda DIY dan juga ahli-ahli sejarah itu sesuai dengan yang disepakati sebagai komitmen bersama.

"Memang perlu ada kajian berkaitan dengan hari-hari bersejarah di Yogya, tapi kami berharap jangan sampai kajian itu dilakukan justru ada kemunduran dari peristiwa sejarah itu sendiri," katanya.

Untuk itu dibutuhkan klarifikasi terhadap sumber sejarah, pelaku sejarah dan juga mereka yang selama ini mengamati tentang hari-hari bersejarah yang ada di Yogya khususnya, dan Indonesia pada umumnya. "Kajian khusus itu memerlukan diskusi agar semua menjadi bagian yang indah pada waktunya," kata Aris.

Pemda DIY, menurut Aris, akan berbuat lebih baik dari apa yang sudah dilakukan sekarang ini. Tidak kemudian menjadikan hari-hari bersejarah sebagai salah satu bentuk untuk mengisi museum, tapi Pemda DIY akan mencoba menjadikan hari-hari bersejarah



KR-Istimewa
Aris Eko Nugroho SP MSI

raha yang ada di Yogya ini menjadi sesuatu yang menarik bagi masyarakat, untuk kemudian mengetahui peristiwa sejarah yang pernah ada, termasuk di dalamnya nilai penting yang ada di dalam sejarah itu sendiri.

Di masa sekarang ini, menurut Aris, media sosial menjadi cara untuk memberitahukan atau menginformasikan pada masyarakat mengenai sejarah Yogya. Salah satunya menggunakan YouTube channel, seperti dilakukan oleh Paniradya Kaistimewan DIY. Di channel itu ada film dokumenter maupun rembang sejarah dengan mereka yang memang ahli di bidangnya.

"Kami berharap, sejarah yang ada di Yogya bukan sebagai bagian dari masa lalu saja, tapi bagaimana kemudian menjadi bagian suatu cerita yang pada akhirnya bisa menjadikan inisiasi bagi masyarakat di Yogya untuk menjadi lebih baik di dalam melakukan pembangunan di DIY,"

katanya pula.

Aris juga berharap apa yang dilakukan Paniradya Kaistimewan ini berkembang terus kemudian dicermati dan dikoreksi oleh semua pihak. "Harapan berikutnya bagaimana sejarah ini bisa menjadi satu kesatuan mewarnai keistimewaan di Yogya," kata Aris pula.

Menandai peringatan Yogya Kembali, Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) menggelar acara 'Sinu Sejarah Keistimewaan DIY', Senin (26/6), pukul 13.00-16.00 bertempat di SMA Negeri 1 Teladan, Jalan HOS Cokroaminoto No 10 Yogya.

Acara 'Sinu Sejarah Keistimewaan DIY' bertema 'Yogya Urat Nadi Sejarah Kemerdekaan' akan diwarnai pemutaran video dokumenter 'Proklamasi Kedua'. Dilanjutkan Dialog Keistimewaan: 'Yogya Urat Nadi Sejarah Kemerdekaan' dengan narasumber Aris Eko Nugroho SP MSI (Paniradya Pati Kaistimewan DIY), Julianto Ibrahim MHum (Sejarawan UGM), Hendro Muhaimin MA (Tenaga Ahli Parampara Praja dan Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pusat Studi Pancasila UGM) serta Drs Marmayadi (Guru Sejarah SMAN 1 Teladan) dipandu Wiji Rachmadani (Moderator).

Sinu Sejarah juga dimirahkan pentas tari kreasi dan grup musik BANDit oleh siswa SMA Negeri 1 Teladan, Kwartet String Vord, Kuis Sejarah Berhadiah, dan Pemberian kenang-kenangan berupa buku keistimewaan dari Paniradya Kaistimewan kepada SMAN 1 Teladan Yogya. (Wan)

DIDUKUNG PENUH DANA KEISTIMEWAAN 'SiBona', Bus Sekolah Gratis di Gunungkidul



Podcast Rembang Kaistimewan bertema 'SiBona Bus Sekolah Gratis'.

KR-Wawan Isnawan

YOGYA (KR) - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Perhubungan membuat sebuah program inovatif yaitu 'SiBona' atau Sistem Transportasi Bus Sekolah Ramah Anak. Program ini didukung penuh dana keistimewaan (danais) DIY. Kepala Dinas Perhubungan Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto AP MSI menuturkan, latar belakang dibuatnya program SiBona, karena tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Selain itu, layanan angkutan umum di Gunungkidul juga masih terbatas.

Menurutnya, dengan adanya armada bus SiBona yang siap antar-jemput pelajar bersekolah secara gratis, mampu mengurangi jumlah pelajar berkendara motor saat sekolah. Hasilnya angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar di Gunungkidul bisa ditekan.

"SiBona ini wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan layanan publik di bidang transportasi yang cepat, aman dan murah," kata Rakhmadian dalam Podcast Rembang Kaistimewan bertema 'SiBona Bus Sekolah Gratis'.

Podcast Rembang Kaistimewan diselenggarakan oleh Paniradya Kaistimewan DIY di Gedung Paniradya Kaistimewan DIY, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan Danurejan Yogyakarta, Kamis (22/6) dan disiarkan *live streaming* melalui *channel* YouTube Paniradya Kaistimewan DIY. Kegiatan podcast ini didanai dengan dana keistimewaan.

Rembang Kaistimewan menghadirkan narasumber lain Aris Eko Nugroho SP MSI (Paniradya Pati Kaistimewan DIY), Wulan Spto Nugroho SSIT MT (Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan DIY), Widodo SPd MOr (Komite Sekolah SDN Wonosari Baru) dipandu Wiji Rachmadani. Acara dimoderatori oleh Wawan Isnawan.

Rahasia

sangat boleh. Yang tidak boleh adalah baik rencana di tingkat negara, maupun apalagi hanya sebagai rencana pemerintah, tidak boleh ada yang dirahasiakan.

Jadi, mengherankan jika selama ini rakyat tidak boleh tahu hal-hal yang biasa disebut sebagai rahasia negara. Memang, kemudian rakyat menjadi tahu setelah yang katanya rahasia negara itu diumumkan atau disosialisasikan secara resmi. Kalau praktik dari rahasia negara itu menguntungkan

dan membuat nyaman rakyat, memang tidak masalah. Kalau menyengsarakan dan merugikan rakyat dan tetap rakyat yang menderita, itulah kezaliman yang nyata dari negara ataupun pemerintah.

Jika tidak ada rahasia negara, dan jika dari awal semua rencana negara diketahui rakyat, maka apapun risiko dari operasi yang sudah diketahui dari awal tersebut, bisa ditanggung bersama. Memang, mungkin mekanismenya menjadi ri

bet. Akan banyak perdebatan terkait berbagai rencana yang diketahui rakyat. Akan banyak kepentingan dan sudut pandang yang berbeda dalam menafsirkan dan menempatkan rencana negara tersebut. Di situlah letak substansi demokrasi.

Semua hal kehidupan dan nasib rakyat, sebagai pemilik daulat tertinggi, tidak boleh rakyat tidak mengetahuinya. Tidak boleh nasib rakyat, yang nasib dirinya dimandatkan untuk dikelola negara, tetapi justru dirahasiakan.

Logika selama ini justru terbalik, dan sangat merugikan rakyat. Seharusnya, yang boleh memiliki rahasia itu justru rakyat. Rakyat boleh menyimpan aspirasinya sebagai rahasia dirinya sendiri. Rakyat boleh menyimpan harapan-harapan terhadap kehidupan dan masa depannya, juga rasa suka dan tidak suka. Toh, sebenarnya, dengan teknologi yang terbuka ini, tidak ada seorang pun yang bisa menyimpan rahasia pribadinya lagi.

Andaikan ada rakyat membocorkan rahasia dirinya, itu boleh dipahami sebagai kebebasan dirinya untuk tidak perlu menempatkan hal itu sebagai rahasia. Dengan demikian, rahasia atau tidak menjadi suatu pilihan bagi rakyat. Dalam hal ini, tentu akan banyak kategori-kategori rahasia rakyat. Dari berbagai kategori itu, ada rahasia yang berimplikasi pada kehidupan bernegara, ada yang tidak.

Itulah sebabnya, negara boleh punya aparatus intelijen dan berbagai aparat lain untuk menyelidiki aspirasi rahasia rakyat tersebut. Dari berbagai kerja intelijen untuk menangkap aspirasi rahasia rakyat, maka berbagai laporan tentang rahasia rakyat tersebut diformulasikan secara canggih. Setelah itu diteruskan menjadi berbagai strategi dan kebijakan negara untuk mengelola aspirasi rakyat.

Namun, jangan sampai kemudian aparatus negara justru menjadi alat negara untuk menekan dan mengontrol rakyat. Kalau itu yang terjadi, aspirasi rahasia rakyat tidak bisa diketahui secara baik bahkan bisa saja palsu. Hal itu menyebabkan berbagai kebijakan negara menjadi tidak pas dan tidak relevan bagi rakyat.

(Penulis adalah Kaprodi Magister Sastra FIB UGM)-d

Pakai Sambungan hal 1

Mura Astina memandu Kaisar selama berkunjung ke Candi Borobudur. Dengan memakai sandal Upanat (alas kaki khusus), Kaisar menaiki struktur bangunan Candi Borobudur didampingi Gubernur Jateng. Kaisar juga sempat mengabadikan beberapa relief di Candi Borobudur menggunakan kamera yang dibawanya.

Menurut Ganjar, Kaisar Naruhito sangat senang berkunjung ke Candi Borobudur dan sangat *humble*. Banyak hal yang dapat dicarakan berkaitan dengan hubungan antara Jawa Tengah dengan Jepang. "Kunjungan Kaisar Naruhito untuk pertama kali dan ke Indonesia dalam waktu 7 hari. Hal seperti ini belum pernah terjadi. Menurut saya itu tanda saja,

bahwa keakraban dua negara antara Jepang dan Indonesia menjadi begitu penting, dan inilah yang mesti harus di-utilisasi agar kerja sama ini membuahkan hasil yang lebih penting. Maka diplomatiknnya, politiknya, ekonominya, B2B-nya maupun lainnya diharapkan dapat memanfaatkan hubungan baik ini," ujarnya.

Sementara itu Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC) Febrina Intan mengatakan, Kaisar Jepang sangat respek terhadap Candi Borobudur. "Beliau mengikuti setiap ketentuan kunjungan sesuai dengan yang berlaku di Candi Borobudur, seperti menggunakan alas kaki khusus (Upanat), pendampingan selama, maupun lainnya," tuturnya. (Tha)-d

KPK Sambungan hal 1

pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Hal ini sejalan dengan target KPK untuk melakukan *asset recovery* keuangan negara sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi di Indonesia," tutur Ali.

KPK resmi menahan dan menyematkan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" kepada mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen)

Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari Senin (3/4) lalu. RAT ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengkondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakannya.

RAT diduga memiliki beberapa perusahaan, di antaranya PT Artha Mega Ekadhana (AME) yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan. (Ful)-f

DPAD DIY Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Arsip



Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Arsip Desa Kalurahan Mandiri Budaya di Kalurahan Putat Patuk Gunungkidul

WONOSARI (KR) - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY menyelenggarakan Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Arsip di Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, Rabu hingga Jumat (21-23/6). Diikuti 30 peserta, kegiatan berlangsung di Kalurahan Mandiri Budaya Putat Kapanewon Patuk, Gunungkidul.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY menyelenggarakan Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Arsip di Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang rencananya dilaksanakan di 5 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya di DIY dengan menggunakan anggaran Dana Keistimewaan (Danais) DIY.

Wardoyo SSn MM, Kabid Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan DPAD DIY mengatakan, kearsipan atau arsip dalam lem-

baga maupun perorangan, tak hanya sekedar penting namun sudah menjadi kebutuhan pokok atau primary needs.

Wardoyo memaparkan pengelolaan arsip yang kurang tertata akan menimbulkan permasalahan dan berakibat tidak maksimalnya pelayanan. Sehingga arsip tersebut wajib dikelola secara baik dan benar sesuai ketentuan. Karena itu sosialisasi diselenggarakan dengan tujuan agar arsip di kalurahan dapat tertata baik.

"Pendampingan pengelolaan arsip di Desa/Kalurahan Mandiri Budaya diharapkan akan meningkatkan pemahaman arti pentingnya pengelolaan arsip untuk mewujudkan tertib arsip, sehingga tersedianya arsip yang autentik, utuh dipercaya sebagai bukti akuntabilitas kinerja," urai Wardoyo.

Peserta yang merupakan perangkat desa/kalurahan

Putat mengikuti pemaparan materi mengenai Pengantar Kearsipan oleh Rusidi SIP MM selaku Arsiparis Ahli Madya DPAD DIY. Disampaikan Rusidi, peran tentang kearsipan yakni Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan serta lembaga kearsipan mempunyai kewajiban melakukan pengelolaan arsip.

Sementara, Pemateri Adriana SSos MAP, Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul menjelaskan mengenai Analisis Pengelolaan Arsip. "Arsip tidak hanya berupa dokumen namun dapat berupa foto, rekaman, video dan yang lainnya," tegasnya. (Sal)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY Tindak dan Edukasi Larangan Ikan Membahayakan

YOGYA (KR) - Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mengencarkan pengawasan ikan berbahaya dan merugikan atau invasif di toko-toko ikan hias, restaurant, pelaku usaha atau penghobi ikan dan pembudidaya ikan hias di DIY. Tak kurang tiga bulan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang bekerjasama dengan Ditjen PSD KP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP Cilacap), SKIPM DIY dan Ditpolairud DIY, berhasil memusnahkan 85 ikan berbahaya dan merugikan dengan berbagai jenis dan ukuran.

Penindakan hasil pengawasan dan edukasi larangan ikan membahayakan atau merugikan dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Sagan Yogyakarta, Jum'at (16/6).

Acara dihadiri 70 peserta terdiri para pelaku usaha dan restaurant, penghobi ikan hias, penjual ikan hias, akademisi, BKIPM DIY dan Dinas Kelautan dan Perikanan atau terkait Kabupaten dan Kota. Turut hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Ditjen PSD KP Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Perikanan Bu-



Pemusnahan ikan invasif hasil pengawasan di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY oleh Kepala DKP DIY beserta instansi terkait

didaya.

Dalam arahnya Ir Bayu Mukti Sasongka MSI selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mengajak masyarakat DIY untuk bersama-sama mengurangi ikan-ikan hias yang berbahaya dan tidak memasukkan ikan yang bersifat invasif (sesuai undang-undang yang berlaku) ke dalam perairan umum. Karena menyebabkan jumlah populasi ikan lokal berkurang.

Bayu menjelaskan, pihaknya telah bekerjasama dengan instansi terkait untuk kegiatan sosialisasi, sidak dan pengawasan ikan merugikan atau berbahaya. Selain itu juga melakukan kegiatan pemulihan populasi ikan lokal seperti sosialisasi dan restocking di perairan umum yang dilaksanakan di

kabupaten dan kota. Bayu juga menyebut, adanya undang-undang PERMEN No 19 tahun 2020 dibuat untuk kebaikan dan kepentingan kelestarian sumber daya ikan di perairan umum daratan.

"Kita kerjasama dengan Dirjen dan instansi lainnya melakukan pengawasan lalu mensosialisasikan aturan Permen KP 19 tahun 2020 supaya keberlanjutan ikan lokal bisa berkembang," sebutnya. Pihaknya juga akan melakukan terus operasi di pasar ikan hias kategori berbahaya (invasif) agar para pedagang tidak memperjual belikan lagi ikan-ikan yang masuk dalam kategori berbahaya ke para pembudidaya ikan, pengusaha dan juga yang lainnya. (Sal)